

TAJUK RENCANA

Mengefektifkan Kampanye di Media Massa

PANDEMI mengubah banyak hal. Namun ketika Pilkada 2020 tak hendak lagi diubah waktu pelaksanaannya. Maka beberapa aturan pun kemudian diubah. Mengikuti dan menyesuaikan protokol kesehatan di masa pandemi menjadi dalih utama.

Kampanye merupakan problem krusial dan menghadirkan pelbagai macam kekhawatiran. Padahal, kampanye menjadi ajang bagi para calon kepala daerah untuk meyakinkan pemilih dengan mengenalkan visi, misi dan programnya. Kegiatan yang kini kian dikhawatirkan akan menghadirkan kluster baru pandemic Covid-19. Pasalnya, dalam kampanye ada pengumpulan massa dalam pelbagai kegiatan. Lahirnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 6/2020, PKPU 13/2020 dan PKPU 13/2020 sebagai *lex specialis* adalah upaya-upaya untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan standar protokol kesehatan.

Namun dalam pertemuan Forum Pemimpin Redaksi Media Massa di Yogyakarta beberapa waktu lalu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong optimalisasi kampanye Pilkada 2020 melalui media massa. Menurutnya, hal itu jauh lebih efektif untuk menyampaikan visi misi dan program para kandidat kepala daerah. Sekaligus mencegah persebaran Covid-19. Media massa dinilai menjadi pilihan yang menarik bagi penyebarluasan informasi program dan visi misi calon kepala negara. "Hasil survei menunjukkan kampanye pencegahan Covid-19 lewat media massa cukup efektif. Mencapai 67%," ungkap Moeldoko. (KR, 2/10)

Moeldoko bahkan berterus terang bahwa peraturan yang sudah ada bisa diubah untuk penyesuaian tersebut. Mengingat regulasi yang ada membuat batasan waktu. Seperti, pasal 34 PKPU 4/2017 menyebutkan waktu efektif pemuatan materi kampanye hanya 14 hari sebelum masa

tenang.

Bak gayung bersambut. Jauh sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman pernah mengungkap keinginan untuk memperluas ruang kampanye bagi calon kepala daerah, melalui iklan di media massa. Kegiatan berbentuk fisik dikurangi dan ruang kampanye di media cetak dan elektronik ditambah. Hanya tentu saja, mengingat anggaran terbatas, KPU tidak membayai semua iklan tersebut. Artinya, biaya iklan ditanggung pasangan calon (paslon) tersebut.

Hanya saja, kampanye sudah dimulai sejak 26 September silam. Dan masa kampanye saat ini sangat panjang, 71 hari. Meski demikian, sesuai regulasinya, kampanye di media massa hanya 14 hari sebelum masa tenang. Maka bila ada keinginan membuka peluang dan optimalisasi melalui media massa, ketentuan itu harus diubah.

Masalah kampanye di media massa memang diatur cukup detail dalam pasal 36 PKPU 4/2017. Tidak hanya soal waktu yang 14 hari, namun dalam ayat (1) juga ditegaskan mengenai kewajiban mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundangan. Sementara soal tarif standar iklan diberlakukan sama setiap pasangan calon, diatur dalam ayat (2).

Melindungi masyarakat dari Covid-19 lebih penting, ketika pilkada tidak bisa ditunda. Untuk itu, aturan yang dianggap 'menghambat' tentu bisa diubah agar pilkada tidak menghadirkan kluster baru Covid-19. Jika kampanye di media massa menjadi alternatif solusi, maka pengawasan isi kampanye menjadi sangat penting. Apakah perlu dipikirkan adanya satgas khusus mengawasi materi kampanye agar tidak berisikan soal SARA, kampanye hitam, ujaran kebencian, hoaks dan hal lain yang menciderai demokrasi. Ini menjadi tantangan Bawaslu. □

Konstruksi Kesetaraan di Dalam TNI

Edwi Arief Sosiawan

KETERLIBATAN perempuan dalam pertahanan negara (militer) sudah eksis sejak zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan. Sejarah mencatat peran perempuan dalam melawan kolonialisme lebih sulit dipatahkan kolonial salah satunya adalah Tjut Nyak Dien dari Aceh. Pada sisi lain para perempuan perkasa tersebut juga mampu menduduki posisi penting dalam jabatan militer kala itu, Laksamana Malahayati.

Zaman perjuangan kemerdekaan perempuan dalam laskar wanita juga nampak seperti bertugas menyeter ambulans, mengobati tentara yang sakit, membuat dapur umum, mengajar membaca, menjahit seragam, serta mendistribusikan senjata dan informasi. Lebih dari 15 tahun sejak tahun 1945 pemerintah kemudian meresmikan institusi perempuan dalam korps TNI yang disebut dengan Kowad, Kowal dan Wara (termasuk Polwan). Peresmian ini merupakan bagian dari implementasi menghindari jalur patriarkhis dalam tubuh TNI yang diamanatkan Presiden Soekarno pada waktu itu dan didukung Kongres Perempuan Indonesia (Kowani) (Handayani, 2008).

Mengisyaratkan

Semasa era Presiden Abdurrahman Wahid, yang menginstruksikan pengarusutamaan gender menghasilkan suatu keputusan dalam TNI yang memberikan kesempatan perempuan untuk didik dalam sekolah elit militer seperti Akmil, AAU, AAL dan Akpol. Saat ini mereka yang telah lulus dalam sekolah-sekolah elite TNI tersebut telah menyanggah profesi sebagai perwira TNI bersanding dengan para perempuan perwira TNI yang berasal dari sekolah reguler Secapa, Secaba dan Secatam perempuan.

Namun pertanyaan yang muncul kemudian apakah benar para perempuan tersebut telah mendapatkan porsi yang sama dalam karir mereka ke depan di tiga mata TNI? Beberapa statement dari peting-



KR-JOKO SANTOSO

buah TNI. Jangankan dalam satuan tempur dalam jabatan teritorial peran perempuan perwira masih sangat langka. Tahun 2018 setelah lebih dari setengah abad berdirinya institusi perempuan TNI, perempuan baru dapat menduduki posisi sebagai Komandan Rayon militer (Koramil) dan Komandan Distrik Militer (Kodim). Sementara Polri 10 tahun lebih dahulu memberikan kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan sebagai Kapolda.

Stigma

Untuk menghilangkan stigma konstruksi gender dalam tubuh TNI maka

diperlukan suatu gerakan moral dan niat baik dalam jajaran pimpinan TNI bersama pemerintah. Pertama, menghilangkan kentalnya kultur patrilineal serta dogma dan mitos bahwa perempuan selalu berbagi peran dalam kewajiban dan tugasnya sebagai TNI. Kedua, adanya dukungan politis yang melibatkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Panglima TNI dalam membunikan konstruksi gender yang ideal bagi perempuan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit TNI melalui surat keputusan dan surat edaran.

Ketiga, aspek dukungan kebijakan. Dalam hal ini seluruh komponen pimpinan TNI di tiga matra beserta panglima TNI mampu membuat program program kerja dan kegiatan yang responsif gender. Keempat, aspek karir SDM yang jelas, perlu dibuat pemeataan dalam karir prajurit perempuan pada semua lini komando. Perempuan prajurit dapat dipromosikan untuk menduduki pimpinan dalam kesatuan-kesatuan utamanya kesatuan teritorial mulai dari Koramil, Kodim, Korem hingga Kodam. Agar lebih mendapatkan apresiasi publik secara luas, maka perempuan perempuan dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan di lingkup institusi pemerintahan lainnya di luar institusi militer. Sehingga konstruksi kesetaraan dan pengarusutamaan gender semakin terwujud dalam tubuh TNI. □

*) *Edwi Arief Sosiawan*, *Associated Professor Prodi Mikom FISIP UPN Veteran Yogyakarta*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Rekonstruksi Pelajaran Sejarah

Ardian Nur Rizki

(Yudi, 2014).

Degradasi mata pelajaran sejarah membuat kita mengalami kemiskinan wahana untuk membunikan keteladanan pahlawan maupun keluhuran nilai hidup di masa silam. Perlu upaya progresif untuk menyajikan pembelajaran sejarah menjadi lebih inovatif dan atraktif, sekaligus untuk mengimplementasikan paradigma baru pendidikan.

Peristiwa sejarah yang sudah berlangsung di masa silam seyogianya dapat dihadirkan guru di pelupuk mata siswa. Aktualisasi dan kontekstualisasi peristiwa sejarah dapat diupayakan dengan menghadirkan objek sejarah ke dalam pembelajaran, baik dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, situs sejarah, ataupun museum.

Rekonstruksi

Selain metode, hal fundamental yang mendesak untuk direkonstruksi adalah konten pelajaran sejarah. Tak dapat dimungkiri, dialektika dalam peristiwa sejarah adalah keniscayaan. Unsur kepentingan dan subjektivitas senantiasa melekat dalam interpretasi peristiwa sejarah. Henk Schulte Nordholt, Ratna Saptari, dan Bambang Purwanto, dalam esai *Memikir Ulang Historiografi Indonesia* (2008), mengutarakan bahwa penulisan sejarah nasional bukan sekadar kegiatan intelektual atau akademis semata, melainkan juga bermakna politis.

Penulisan sejarah dianggap sebagai fondasi pemerkokoh identitas nasional. Sehingga klaim mengenai legitimasi kekuasaan, asal-usul, siapa pahlawan dan siapa korban, siapa lakon dan siapa musuh, tidak akan pernah surut untuk

dijadikan tema perdebatan sejarah.

Konten pelajaran sejarah dalam kurikulum kita terangkai dalam kisah hitam dan putih. Hanya ada dua lakon: antagonisme dan protagonisme. Pembelajaran sejarah di sekolah seakan tidak memberi ruang bagi dinamika sikap dan perjuangan. Tan Malaka atau Syafrudin Prawiranegara, contohnya. Betapa pun besarnya jasa kedua tokoh tersebut dalam membangun dan menjaga eksistensi Republik Indonesia. Namun, pernah menjadi pimpinan PKI dan PRRI adalah dosa besar yang menggugurkan semua jasa.

Perombakan konten pelajaran sejarah adalah keniscayaan. Muatan mata pelajaran sejarah sebagai wahana doktrinasi dan alat politik penguasa mesti segera ditinggalkan. Selain berbasis fakta, mata pelajaran sejarah -- sebagaimana pesan Mas Menteri -- seyogianya membawa mutiara pesan dan inspirasi keteladanan.

Kita harus 'berhenti belajar sejarah' dan memulai babak baru untuk 'belajar dari sejarah'. □

*) *Ardian Nur Rizki*, *Guru Sejarah di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) Johor Bahru, Malaysia*

Pojok KR

Diketemukan miras di bandara yang celaka -- **Miras selalu membawa petaka** ***

Deklarasi pilkada di Kota Magelang: utamakan sehat dan selamat -- **Sehat dan selamat itu mahal harganya** ***

Pelaku étrafficking di Banyumas dibekuk -- **Hukum maksimal perusak generasi muda**

Berabe

Pikiran Pembaca
Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Ketahanan Pangan

KEGIATAN produksi pertanian tentu tidak bisa lepas dari berbagai input yang diperlukan. Input merupakan faktor produksi yang digunakan untuk menunjang jalannya produksi sampai menghasilkan produk berkualitas. Salah satu inputnya yaitu pupuk. Pupuk merupakan input yang dapat meningkatkan produksi pertanian. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pupuk termasuk unsur utama dalam kegiatan produksi pertanian atau budidaya. Pupuk adalah sumber nutrisi bagi tanaman. Nutrisi tersebut juga bermacam-macam. Pupuk diberikan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, ketahanan pangan adalah satu hal yang sangat perlu untuk terus diperhatikan. Masyarakat tentunya memerlukan bahan pangan yang terus tersedia. Kunci dari hal ini tentunya adalah sektor pertanian. Apabila sektor pertanian kita mati, maka produksi bahan pangan pun akan terhambat.

Meninjau hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa ketersediaan pupuk menjadi unsur penting dalam menjaga sektor pertanian agar tetap berjalan. Sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan pun telah menggandeng masyarakat untuk berkebud di rumah. Tentunya hal ini membuat tingkat kebutuhan pupuk ikut meningkat, sehingga ketersediaan pupuk dari pabrik perlu diperhatikan. Menteri Pertanian Syahrul

Yasin Limpo juga pernah mengatakan bahwa, jaminan ketersediaan pupuk sangat diperhatikan oleh pemerintah agar ketahanan pangan di Indonesia tetap terjaga.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kelangkaan pupuk yang terjadi karena adanya permainan distributor. Di sinilah pemerintah harus mengambil sikap dan tindakan yang tepat guna memerangi permainan distributor nakal. Salah satu tindakan awal yang dapat dilakukan pemerintah adalah memperluas fasilitas pelayanan bagi para petani, sehingga petani dapat melaporkan kendala yang dihadapi sampai akhirnya pemerintah bisa langsung menindaklanjuti laporan tersebut.

Ketahanan pangan tidak hanya menjadi beban dari para petani, tapi juga beban kita semua, masyarakat Indonesia. Adanya perkembangan inovasi dan teknologi berkaitan kegiatan bertani di rumah sudah bisa kita terapkan. Setidaknya kita membantu diri kita sendiri untuk menjaga kebutuhan pangan keluarga kita. Di samping itu, kita juga dapat mengurangi beban petani di saat pandemi seperti ini yang menyebabkan gerak petani terbatas dengan mengingat perlunya protokol kesehatan. Dengan demikian, ketahanan pangan Indonesia pun bisa terjaga, atas nama masyarakat Indonesia bersama-sama. □

Hanita Athasari Zain, Mahasiswi Fakultas Pertanian, UGM.

ISU reduksi alokasi mata pelajaran sejarah di sekolah sempat menyeruak. Kabar angin bersumber dari menyebarnya naskah permutasi penyederhanaan kurikulum kepada publik. Agar tak mengundang konflik berkepanjangan, isu langsung ditepis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dalam video klarifikasi yang diunggah di akun instagram pribadinya (20/9), Mas Menteri menyatakan bahwa ada banyak konsepsi penyederhanaan kurikulum. Pelbagai konsepsi ini tengah dibahas dalam diskusi publik dan diskusi kelompok terpusat.

Selain menepis kabar angin mengenai reduksi alokasi mata pelajaran sejarah, Mas Menteri juga menyatakan bahwa sejarah, sebagai tulang punggung identitas nasional, harus dilekatkan kepada generasi muda dengan pembelajaran yang relevan dan inspiratif. Pernyataan Mas Menteri ini merupakan tantangan klise mata pelajaran sejarah di sekolah. Alokasi waktu pelajaran yang melimpah, tanpa dibarengi dengan mutu dan konten pelajaran yang menggugah, tentu akan nihil gairah dan minim faedah.

Strategis

Mata pelajaran sejarah mengemban peran strategis menumbuhkan karakter positif: sikap nasionalisme, patriotisme, toleransi, dan cinta tanah air. Melalui transmisi kisah keteladanan pahlawan, mata pelajaran sejarah dapat mendiseminasi nilai-nilai luhur dan sikap patriotik kusuma bangsa.

Dalam pelaksanaannya, ikhtiar mentransmisikan kisah keteladanan pahlawan acap menuai kemuskilan. Pasalnya, pelajaran sejarah justru kerap disajikan dengan cara-cara konservatif. Sehingga mata pelajaran ini identik dengan predikat membosankan dan nihil guna. Konten pelajaran sejarah yang kerap dipersempit menjadi sejarah peperangan dan silsilah kerajaan, tidak membantu menemukan 'mutiara pesan moral' yang terpendam dalam lumpur sang waktu

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSE. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.

Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSE. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussyahada.

Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hastu Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga..Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%